

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur dalam Menanggulangi Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai perwujudan fungsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat. Serta mengetahui dan memahami aturan mengenai Sanksi Administratif bagi Pelanggar Protokol Kesehatan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease (COVID-19)* di daerah Provinsi Jawa Barat. Bahwa Pergub ini masih menjadi Payung Hukum untuk memberi sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan di Jawa Barat, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulannya adalah Peraturan Gubernur ini tidak memenuhi Syarat Formil dan materil dan dikatakan bahwa Peraturan Gubernur yang Memuat sanksi di dalamnya adalah Cacat Materil.

Kata Kunci : *Coronavirus Disease (COVID-19), Sanksi Administratif, Kewenangan Gubernur*

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Governor's duties and authority in Tackling the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19) as a manifestation of his function as representatives of the Central Government in the Regions and Heads of Regions in West Java Province. As well as knowing and understanding the rules regarding Administrative Sanctions for Health Protocol Violators in Governor Regulation Number 60 of 2020 concerning Imposition of Administrative sanctions against Health Order Violations in the Implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and Adaptation of New Habits (AKB) in Combating Coronavirus Disease (COVID- 19) in the area of West Java Province. Whereas this Pergub is still a legal umbrella to impose sanctions on violators of the Health Protocol in West Java. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach. The conclusion is that this Governor Regulation does not meet the Formal and material requirements and it is said that the Governor Regulation which contains sanctions is Material Disability.

Keywords: Coronavirus Disease (COVID-19), Administrative Sanctions, Authority of the Governor